

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Telepon 512688, 512820 Fax. 580692**

# PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP BAHAN ACARA NOMOR 15 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

**Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Hari Jum’at Wage, 17 Juni 2021**

Yang Kami hormati Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan lainnya, serta segenap anggota DPRD DIY

Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,

Yang terhormat Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,

Yang Kami hormati, Sektertaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Asisten Keistimewaan DIY dan segenap pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang Kami hormati seluruh rekan media baik cetak, elektronik maupun online Serta hadirin semua

## Bismillahirahmanirrahim

***Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh***

***Salam sejahtera untuk kita semua***

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmatNya, sehingga kita bisa hadir bersama baik secara virtual maupun *offline* dalam Rapat Paripurna hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri dan SMK Negeri DIY Tahun Ajaran 2022 yang tahapannya akan dimulai secara *online* pada 21 Juni – 1 Juli 2022. Berkaitan dengan hal tersebut, Fraksi Partai Golkar DPRD DIY berharap proses PPDB Tahun Ajaran 2022 dapat berlangsung secara transparan, non diskriminatif, objektif, akuntabel dan berkeadilan dapat terjadi, sehingga dapat meminimalisir potensi kecurangan praktik jual beli kursi dan suap serta diskriminasi kepada kelompok afirmasi (difabel dan kelompok miskin).

Sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Qurban. Fraksi Partai Golkar berharap penanganan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)) pada hewan ternak di DIY dapat tertangani dengan baik dan diantisipasi secara maksimal. Setiap rombongan hewan ternak dari luar harus membawa Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), mengingat kasus PMK di DIY mencapai 3.120 kasus *(Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY per Selasa 14/6/2022*). Berdasarkan data [siagapmk.id](http://siagapmk.id/) yang dirilis oleh Pemerintah Pusat, kasus PMK DIY sebesar 3.120 kasus, menempatkan DIY pada urutan ke-7 jumlah kasus PMK tertinggi secara nasional. Fraksi Partai Golkar berharap Pemda DIY dapat menangani kasus PMK di DIY dengan baik sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen pada Idul Qurban nanti.

Kami juga berharap Pemda DIY dan seluruh *stakeholder* penangangan Covid-19 di DIY dapat tetap menjaga kasus Covid-19 terus melandai sehingga kita dapat memasuki era endemi dengan tetap mendisiplinkan warga masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan secara ketat, mengingat mobilitas pendatang untuk masuk ke DIY semakin meningkat seiring dengan melandainya kasus Covid-19 di Indonesia.

## Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,

Fraksi Partai Golkar mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah DIY yang telah mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 12 kali berturut-turut. Predikat ini harus terus dipertahankan dengan tetap meningkatkan tata kelola keuangan yang baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam situasi endemi yang sampai saat ini kita masih akan terus berdampingan dengan Covid-19. Selain itu, Kami berharap Pemda DIY segera menindaklanjuti 7 (tujuh) temuan BPK pada Laporan Keterangan Pemerintah Daerah (LKPD) DIY tahun 2021, meliputi : (1) Pengelolaan investasi jangka panjang pada BUKP belum

memadai, (2) Belanja hibah barang pada Dinas Kebudayaan dan hibah uang pada Dinas Pariwisata belum sesuai petunjuk teknis pelaksanaan hibah, (3) Pembebasan tanah untuk jalan segmen Garongan Congot belum didukung penyediaan dana secara memadai, (4) Pelaksanaan belanja modal pada beberapa kontrak tidak sesuai ketentuan, (5) Pengelolaan piutang pajak, retribusi, dan piutang lain-lain PAD yang sah, (6) Pengelolaan persediaan obat pada instalasi farmasi Dinas Kesehatan belum memadai, dan (7) Pengelolaan atas Barang Milik Daerah (BMD) belum tertib. **Upaya konkrit apa yang akan dilakukan Pemda DIY atas temuan BPK pada LKPD tahun 2021 ?. Mohon tanggapan.**

## Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,

Fraksi Partai Golkar DIY mengapresiasi peningkatan realisasi pendapatan pada APBD tahun 2021 yang mencapai 100,5% dari anggaran yang direncanakan sebesar 5,675 trilyun dan direalisasikan sebesar 5,703 trilyun. Kami mengapresiasi peningkatan realisasi pendapatan daerah yang disumbang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat tahun 2021 masih terjadi lonjakan kasus Covid-19. **Pertanyaan Kami, sektor-sektor pendapatan apa yang berkontribusi atas peningkataan PAD?. Mengapa hal tersebut terjadi?. Mohon tanggapan.**

Pada sisi pendapatan transfer pemerintah pusat capainnya masih pada angka 99,71% dari anggaran sebesar 3,805 T dan terealisasi sebesar 3,794 T. **Pertanyaan kami, (1) mengapa serapan atas transfer pemerintah pusat tidak mencapai 100%? (2) Upaya apa yang akan dilaksanakan oleh Pemda DIY dalam optimalisasi serapan atas pendapatan transfer pemerintah pusat?**

Sementara itu, pada sektor Belanja APBD DIY tahun 2021 belum memenuhi target yang diharapkan, dikarenakan capaian realisasi belanja daerah sebesar 91,46%. Capaian realisasi belanja daerah yang meliputi Belanja Operasi sebesar 90,10%, Belanja Modal (90,53%), Belanja Tidak Terduga (58,77%) maupun Belanja Transfer (98,60%), yang mengakibatkan realisasi belanja daerah pada APBD 2021 hanya sebesar 91,46%. **Pertanyaan kami, mengapa serapan belanja daerah pada APBD 2021 tidak mencapai 100% bahkan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 92,63% ?.**

Selanjutnya dalam realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2021 hanya tercapai sebesar 58,77%. **Pertanyaan kami, mengapa capaian untuk Belanja Tidak Langsung (BTT) hanya mencapai 58,77% mengingat pada Bulan Juli-Agustus 2021 kasus Covid-19 mencapai puncak gelombang ketiga**, **yang sebenarnya BTT dapat digunakan untuk penanganan Covid-19 ?.**

Selain itu perlu diperhatikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. SILPA 2020 sebesar 484,453 M sedangkan SILPA 2021

sebesar 554,487 M, sehingga SILPA 2021 mengalami kenaikan sebesar 70,034 M atau 12,63% dibandingkan tahun 2020. Kami berharap dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya lebih efektif dan efisien. **Mohon penjelasan perencanaan penggunaan SILPA tahun 2021 sebesar 554,487 M.**

## Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,

Fraksi Partai Golkar DIY **mendukung segala upaya yang dilakukan oleh Pemda DIY dalam pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan dan akuntabel** dengan memperhatikan :

1. Kepentingan masyarakat khususnya kelompok miskin dan rentan miskin, mengingat angka kemiskinan di DIY tahun 2021 sebesar 11,91%, yangmana angka kemiskinan di DIY di atas angka kemiskinan nasional sebesar 9,71%.
2. Menindaklanjuti secepatnya temuan BPK pada LKPD DIY tahun 2021.
3. Pemda DIY perlu melakukan optimalisasi penggunaan Dana Keistimewaan DIY untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY.
4. Pemda DIY perlu melakukan inventarisasi dan optimalisasi pengelolaan atas aset-aset daerah.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar DIY terhadap pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi kita kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di DIY. Aamiin.

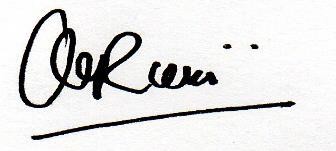
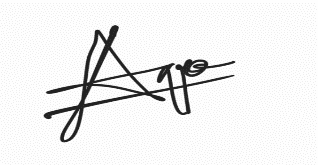
## Sekian dan terima kasih

***Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuuh***

Yogyakarta, 17 Juni 2022

Ketua, Sekretaris,

Fraksi Partai Golkar DPRD DIY Fraksi Partai Golkar DPRD DIY

(Rany Widayati, SE, MM) (Agus Sumaryanto, ST)